

PENGEMBANGAN SKILL MAHASISWA MELALUI PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

A. Feby Febriani ^{1*}, Muhammad Iqbal ², Erfina³

^{1*2.3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang,
Email : ¹andifebyfebriani.0910580419062@gmail.com, ²iqbal.sidrap@yahoo.com,
³erfina.erul85@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dan upaya pengembangan skill pada program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Penelitian ini menerapkan teori implemenentasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III serta menggunakan jenis metode studi kasus dan penelitian kualitatif. Peserta program pertukaran mahasiswa mardeka bertugas sebagai subjek penelitian, bersama dengan dosen. Pengamatan langsung dan wawancara adalah dua metode pengumpulan data yang digunakan. Analisis data dilakukan menggunakan N-Vivo 12 plus. Implementasi kebijakan pemerintah pada program pertukaran mahasiswa merdeka akan berjalan dengan baik apabila ada kerjasama Dosen dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang dialami pihak birokrasi kampus khususnya dalam komunikasi atau koordinasi yang dimiliki PIC. Upaya pengembangan skill melalui program pertukaran mahasiswa merdeka menunjukkan bahwa melalui program ini, mahasiswa dapat meningkatkan soft skill seperti pengendalian emosional dan komunikasi yang baik untuk menyelesaikan suatu tugas dan hard skill berupa pengetahuan dan teknis dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Kata Kunci : *Implemetasi Kebijakan; Pengembangan Skill; Program Pertukaran Mahasiswa.*

ABSTRACK

This study aims to determine the implementation of government policies and skills development efforts in the independent student exchange program at Muhammadiyah Sidenreng Rappang University. This study applies the theory of policy implementation put forward by Edward III and uses a type of case study method and qualitative research. Participants in the Mardeka student exchange program served as research subjects, together with lecturers. Direct observation and interviews are the two data collection methods used. Data analysis was performed using the N-Vivo 12 plus. The implementation of government policies on the independent student exchange program will run well if there is cooperation between lecturers in carrying out their duties. In addition, there are several obstacles experienced by the campus bureaucracy, especially in communication or coordination owned by the

Diserahkan : 2022-12-23,
Direvisi : 2022-12-29,
Diterima : 2023-02-28,

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dilisensikan di bawah Lisensi | 1
Creative Commons Atribusi-NonKomersial
4.0 Internasional. (CC BY-NC 4.0)



PIC. Efforts to develop skills through the independent student exchange program show that through this program, students can improve soft skills such as emotional control and good communication to complete a task and hard skills in the form of knowledge and technical skills in completing work properly.

Keywords: *Policy Implementation; Skill Development; Student Exchange Program.*

PENDAHULUAN

Merdeka *Learning* atau sering disebut dengan Kampus Merdeka, memiliki strategi Merdeka *Learning* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia meliputi Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bakat dan minatnya, menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard skill dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten. Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau biasa di singkat PMM artinya salah satu program unggulan mahasiswa diberi kesempatan untuk menggunakan kebebasannya buat belajar di luar studi dan di luar perguruan tinggi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2020, mahasiswa diperbolehkan mengambil dua semester mata kuliah di luar mata kuliah reguler. (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 7/Per/M.KUKM/VII/2015, 2020)

Dalam upaya mengembangkan dan/atau memperluas kompetensinya, mahasiswa berkesempatan melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Anda dapat mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi manapun di Indonesia. (Adriati, Setiawidayat, & Fagih, 2021). Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka akan ada Modul Belajar Nusantara yang memfasilitasi pertukaran pelajar antar pulau dari institusi publik ke swasta dan sebaliknya, mendorong pelajar untuk menggali kekayaan budaya Indonesia. Pertukaran Mahasiswa Mandiri (PMM) menyelidiki dan mengkaji keragaman budaya nusantara, bergaul dengan mahasiswa dari berbagai lokasi, dan memiliki pilihan untuk belajar di universitas lain di Indonesia. (Ecca et al., 2022) terdapat berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam learning exchange ini: 1) pertukaran mahasiswa lintas program studi pada universitas yang sama, 2) pertukaran mahasiswa dalam satu program studi pada universitas yang sama, dan 3) pertukaran mahasiswa dalam satu program studi pada institusi yang sama pertukaran mahasiswa antar program studi di universitas lain yang tidak sinkron, 4) Pertukaran pelajar antar prodi dan perguruan tinggi yang tidak selaras (Zainudin & Utami, 2021). Penelitian ini penulis membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah pada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan upaya pengembangan skill mahasiswa melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995) beropini bahwa proses interaksi antara mendefinisikan tujuan dan mengambil langkah-langkah untuk mencapainya dikenal sebagai

implementasi. Sederhananya, ini adalah kapasitas untuk membangun hubungan antara sebab dan akibat sehingga kebijakan dapat berdampak. (Fauziah & Vantissha, 2021). Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dialami mahasiswa pada saat pelaksanaan diantaranya yaitu, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar dosen dalam hal pemberian penugasan, ketimpangan akses antara perguruan tinggi untuk melaksanakan program MBKM, sistem administrasi seperti surat tugas yang lambat dari segi fasilitasi, uang saku yang lambat pendistribusiannya, kurang menjawab keresahan dan keinginan mahasiswa.

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, juga dikenal sebagai UMS Rappang, adalah anggota jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan terletak di provinsi Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) mendukung mahasiswa dengan sistem berbasis IT untuk membantu mereka mencapai karir masa depan mereka. Sebagai lembaga swasta (PTS) Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang) telah ikut berperan dalam pelaksanaan program MBKM.

Oleh karena itu perlu melibatkan dosen/staff dan mahasiswa saling berhubungan satu sama lain untuk dijadikan pijakan atau pembanding untuk kedepannya, karena program ini baru berjalan selama dua priode sehingga lebih fokus di implementasi kebijakan dan untuk pengembangan skill mahasiswa masih dalam tahap pengembangan khususnya pada soft skill.

KAJIAN TEORI

Menurut Dunn, istilah "kebijakan" dan "Sanskerta" secara etimologis saling terkait. Adanya tujuan (goal), sasaran (objective), atau kehendak merupakan hal utama yang menentukan efektivitas suatu kebijakan (purpose). Kebijakan tersebut, menurut Jones, adalah "perilaku permanen dan berulang dalam hubungan dengan perusahaan yang terdapat didalam dan melalui pemerintah buat memecahkan persoalan awam.(Hernawan et al., 2022)

Menurut Aderson dan Winarno (2007) Gagasan kebijakan memiliki sejumlah konsekuensi, termasuk:

1. Penekanan dalam kebijakan publik adalah pada maksud atau tujuan daripada tindakan yang ceroboh. Dalam sistem politik kontemporer, tidak ada yang namanya kebijakan publik yang luas begitu saja tetapi dirancang oleh para pemainnya.
2. Kebijakan adalah pola perilaku atau arahan yang diambil oleh otoritas pemerintah; mereka bukan penilaian independen. Suatu kebijakan tidak hanya mencakup pilihan untuk mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan suatu subjek tetapi juga pilihan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang dikatakannya, diinginkannya, seperti membatasi inflasi, mempromosikan perumahan rakyat, atau mengatur perdagangan.
4. Kebijakan publik bisa mendukung atau menentang.
5. Paksaan digunakan secara legal dalam kebijakan publik. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh rakyat wajib menaati kebijakan pemerintah.

Secara umum, kebijakan tertulis adalah keputusan organisasi formal yang mengikat para anggotanya dan dapat mengatur perilaku dengan maksud untuk menumbuhkan nilai-

nilai baru di antara penduduk. Kebijakan tidak memiliki sifat pemaksaan yang sama dengan peraturan perundang-undangan; sebaliknya, mereka berfungsi sebagai panduan untuk bertindak saja. (Jasmarnisa, 2019) Meskipun analisis tersebut menyoroti apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin, analisis tersebut hanya memiliki kualitas yang dapat diadaptasi dan interpretatif. Dalam kebanyakan kasus, kebijakan memiliki fokus pemecahan masalah dan diharapkan memiliki kualitas tertinggi, tetapi tanpa melanggar aturan organisasi atau lembaga lokal mana pun. Dalam kasus lain, kebijakan tersebut harus memberikan ruang interpretasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah arahan yang valid dari suatu kebijakan dikeluarkan, ada proses yang dikenal sebagai implementasi kebijakan yang melibatkan pengelolaan input untuk mencapai output atau hasil bagi masyarakat. (Hernawan et al., 2022) Ada berbagai cara untuk melihat implementasi kebijakan yang mencakup banyak entitas lapisan birokrasi, dll. Model untuk mengimplementasikan kebijakan akan digunakan jika sudah ada variabel atau keadaan berbeda yang berdampak besar pada pelaksanaan kebijakan publik, serta penggunaan pendidikan untuk menambah pengetahuan. Ada beberapa model yang telah diterapkan menurut penganutnya, antara lain model kebijakan publik antara lain oleh Van Metter dan Van Horn (1975), George III (1980), Grindle (1980), Masmanian dan Sabatier (1987).

Menurut George Edward III dalam (Widodo, 2010), ada empat hal yang berdampak seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan, antara lain faktor yang berhubungan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur pemerintahan.

1. Komunikasi

Pengertian komunikasi adalah “proses pemindahan berita dari komunikator kepada komunikan”, menurut Edward III dalam Widodo (2010). Menurut Edward III to (Widodo, 2010), para pelaku kebijakan perlu mendapatkan informasi tentang kebijakan publik agar mereka mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai sesuai rencana.

2. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

3. Struktur Birokrasi

Meskipun terdapat sumber daya yang cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan, para pelaksana memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukannya dan termotivasi untuk melakukannya, menurut Edward III dalam (Widodo, 2010), “implementasi kebijakan mungkin masih belum berhasil karena inefisiensi sistem birokrasi.” Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010)), struktur birokrasi ini mengandung unsur-unsur seperti struktur birokrasi, hirarki kekuasaan, hubungan antar unit organisasi, dan lainnya.

4. Disposisi

Edward III mendefinisikan disposisi sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan pembuat kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat terpenuhi” dalam Widodo (2010).

“Agar implementasi kebijakan berhasil dengan sukses dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut,” ujar Edward III dalam Widodo (2010).

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang menawarkan kesempatan kepada mahasiswa tingkat magister harus menyelesaikan tiga semester pengajaran di luar kelas (Sulistiyani et al., 2022). Dengan menggunakan program ini, seorang mahasiswa mungkin dapat mengembangkan soft skill dan hard skill mereka dengan menyelesaikan satu aspirasi dari kurikulum jangka panjang yang ditawarkan. Selain mampu mengubah kurikulum, forum pendidikan tinggi dirancang untuk memungkinkan hal tersebut (Nasik, 2020). Perguruan tinggi harus mengedepankan metode pengajaran yang berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tidak hanya yang satu ini (Dzikria & Narulita, 2021). Berbagai bentuk kegiatan belajar yang ditawarkan dari program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi yaitu 1. Perukaran Mahasiswa Merdeka, 2. Magang Bersertifikat, 3. Studi Independen Bersertifikat, 4. Proyek Kemanusiaan, 5. Kampus Mengajar, 6. Riset atau Penelitian, 7. Indonesian International Student Mobility awards, dan 8. Wirausahaan Merdeka. Semua Program tersebut dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka dibentuk menawarkan fleksibilitas dan mendorong siswa untuk menyempurnakan kemampuan mereka dengan mengikuti satu hingga tiga semester, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bergantung pada program studi dan/atau minat di luar universitas tempat mereka belajar saat ini, untuk memperkuat dan memperluas keterampilan mereka. Belajar Merdeka di Perguruan Tinggi Kampus Merdeka (KM) berupaya memberikan kesempatan yang lebih luas pada mahasiswa untuk menemukan dan mengembangkan potensi dirinya secara luas dan terbuka melalui aktivitas belajar kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan terobosan teknis lainnya. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berinovasi secara kreatif agar cepat beradaptasi dengan kemajuan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. pada tahun 2021 pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA) 2021 telah ditetapkan sebagai Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM).

Program Pertukaran Pelajar Merdeka adalah program untuk pertukaran pelajar antar gugus wilayah selama satu semester yang memberikan berbagai pengalaman dan mekanisme transfer poin yang maksimal. +/- 20 poin. Program ini memberi mahasiswa kesempatan untuk memperkaya dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dunia nyata mereka sesuai dengan minat dan aspirasi mereka. Peraturan perundang-undangan berikut ini menjadi landasan bagi program Pertukaran Pelajar Mandiri: 1) UUD Negara RI Tahun 1945. 2) UU Nomor 20 Tahun 2003 RI tentang Sistem Pendidikan Nasional 3) UU Nomor 12 Tahun 2012 RI tentang Pendidikan Tinggi 4) Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020. 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang kerja sam a perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang menggunakan deskriptif kualitatif, metode yang mendeskripsikan lebih rinci kegiatan atau item studi yang terhubung dengan fenomena atau membedakannya dari fenomena serupa dan teknik penelitian Studi kasus prospektif biasanya digunakan untuk membantu peneliti menentukan bagaimana suatu kasus akan berkembang. (Sugiyono, 2017). *Action Research*, termasuk penelitian yang dilakukan oleh spesialis lain, merupakan langkah selanjutnya setelah studi kasus ini. Informan penelitian ini dipilih melalui teknik snowball atau mengambil sampel dari sejumlah sumber data yang ukurannya terus bertambah. Mahasiswa yang keluar ikut melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa dan Dosen yang menagani Program Pertukaran Mahasiswa, sebanyak 15 mahasiswa dan 4 dosen menjadi informan penelitian pada penelitian ini. Metodologi pengumpulan data utama dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini digunakan, meliputi teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Pendekatan wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh data primer, sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder. (Ahmad, 2015); (Sugiyono, 2014) Data yang diperoleh berupa informasi dan deskripsi yang berkaitan dengan penelitian, dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan penyelidikan kritis untuk memperoleh informasi tertentu tentang suatu masalah. Analisis data adalah proses mencari dan merangkai data secara metodis melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sanafiah Faisal dengan mengutip pendapat Spradley dalam (Hardani et al., 2020) Penelitian Tindakan yang dilakukan oleh orang lain sebagai tindak lanjut studi kasus ini berpendapat bahwa latar sosial untuk sampel pertama sangat menunjukkan kondisi sosial di mana ia menjadi jenis muara dari banyak domain lainnya. Selain itu, ditentukan bahwa sampel harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh para ahli bila digunakan sebagai sumber data atau sebagai informan. Teknik pengolahan dan Analisis data yang dikumpulkan menjadi data yang sistematis, terorganisir, terstruktur, dan bermakna menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus.

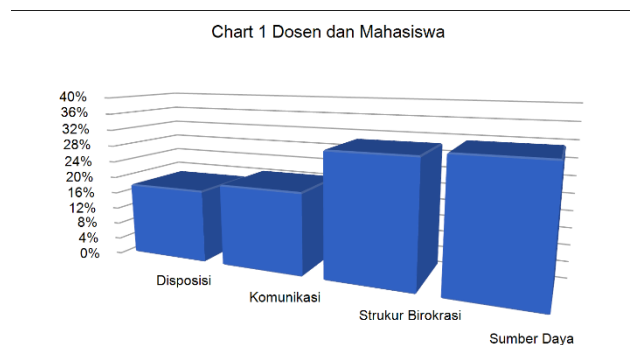
PEMBAHASAN

Kampus Merdeka atau lebih dikenal dengan MBKM merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan bakat dan minatnya, menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Lulusan Program MBKM pada program studi unggulan dapat memperoleh kecemerlangan intelektual, akhlak mulia, dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk bersaing di dunia industri (dudi) dan dunia kerja (Krisnanik, Saphira, & Indriana, 2021). Bukan kontes kolaborasi banyak pihak untuk menjawab dinamika perubahan zaman. (Kamalia & Andriansyah, 2021).

Implementasi, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, melibatkan pemahaman tentang apa yang terjadi setelah suatu program dianggap valid atau terbentuk. Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) berpendapat bahwa tindakan penetapan tujuan dan pencapaian tujuan berinteraksi selama fase implementasi. Sederhananya, agar kebijakan memiliki dampak, keterkaitan perlu dibangun di sepanjang rantai sebab-akibat. Berikut Hasil Visualisasi Project Map Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Implementasi

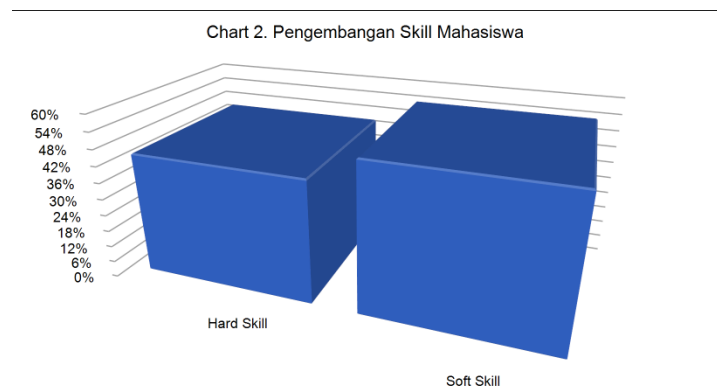
Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Mengembangkan Skill Pertukaran Mahasiswa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan sebagaimana digambarkan oleh Edward III merupakan proses yang bermasalah karena, jika suatu kebijakan tidak disebarluaskan dan dipraktikkan dengan hati-hati, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai. Berikut ini chart implementasi kebijakan dari dosen/staff dan mahasiswa.



Sumber : Hasil Analisis Olahan Data Nvivo 12 Plus (2022)

Berdasarkan chart 1 Disposisi dengan presentase 18,16% kategori rendah dari dosen /staff sudah responsif sedangkan dari mahasiswa masih kurang karena masih ada berkas-berkas yang harus di diselesaikan dan harus menunggu jawaban dari pusat, Komunikasi dengan presentase 20,4% kategori cukup dari dosen maupu mahasiswa bertukar informasi melalui grup WhatsApp, Struktur Birokrasi dengan presentse 30.04% kategori tinggi karena peran dosen/staff membantu mahasiswa dalam pelaksanaan perukaran mahasiswa merdeka, Sumberdaya dengan prsentase 31,39% kategori sangat tinggi karena insentif yang di berikan para dosen/staff ke mahasiswa berjalan dengan baik.



Sumber : Hasil Analisis Olahan Data Nvivo 12 Plus (2022)

Berdasarkan Chart 2 menunjukkan bahwa Hard Skill dengan presentase 45,26% kategori rendah karena pengetahuan mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan dikampus tujuan lebih fokus ke modul nusantara daripada ke mata kuliah, soft skill dengan presentase 54,74% kategori tinggi karena mahasiswa termotivasi mencari pengalaman dan meningkatkan keterampilan dalam mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Implementasi kebijakan saling berhubungan dengan dosen Ini mungkin ditentukan oleh hasil wawancara yang efektif dari dosen maupun mahasiswa yang selalu aktif berinteraksi satu sama lain bertukar informasi, memerikan arahan dan membantu menyelesaikan kendala yang di alami mahasiswa yang ikut melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Pengembangan skill baik hard skill dan soft skill berhubungan dengan mahasiswa karena Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berhasil dalam studi mereka di Perguruan Tinggi (PT) Penerima, serta untuk mendapatkan kredit, membangun keterampilan mereka, dan memajukan karir mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang telah mengimplemetasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka yakni dengan menempatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang untuk melakukan program pertukaran di beberapa instansi terkait. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga telah menerapkan kebijakan program MBKM pertukaran mahasiswa merdeka seperti beberapa PTN/PTS di Indonesia. Berikut adalah beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini: mobilisasi belum terlalu memadai, komunikasi dan koordinasi antara PIC (Person in Charge) terkadang masih sulit dan belum adanya kesesuaian konversi mata kuliah mahasiswa. Implementasi kebijakan yang terjadi di UMS Rappang pada program pertukaran mahasiswa merdeka berjalan efektif. Peran dosen/staff sangat aktif dalam membantu mahasiswa yang meliputi aspek sumberdaya dan struktur birokrasi. Sedangkan hambatannya ada pada aspek komunikasi dan disposisi. Pengembangan Skill yang terjadi di UMS Rappang pada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka masih dalam tahap pengembangan khususnya pada gagasan memperoleh soft skill dari konsep kecerdasan emosional. Diharapkan kedepannya melalui kebijakan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dapat mengembangkan skill mahasiswa (i) sebagaimana tujuan dalam program pertukaran mahasiswa tersebut dan mempererat hubungan antar PTN/PTS berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikaisi*. Indonesia: Gava Media.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (2nd Ed.). Surabaya: Kencana.

- Maleong, L. J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (P. 405). P. 405. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi* (Safitri Yosita Ratri, Ed.). Alfabeta.

Artikel Jurnal dengan DOI

- Adriati, S. F., Setiawidayat, S., & Fagih. (2021). Pelaksanaan pertukaran mahasiswa ke uthm malaysia. *In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, (Ciastech), 1097–1102. Retrieved from <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/3452>
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikaisi*. Indonesia: Gava Media.
- Ecce, S., Mustanir, A., Ahmad, J., Ramlan, P., Adri, K., Mardhatillah, M., & Sulaiman, Z. (2022). Peran Program Pertukaran Pelajar MBKM dalam Pengembangan Kompetensi Lulusan. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.30998/sap.v6i3.11713>
- Fauziah, Y., & Vantissha, D. (2021). PENGARUH IMPLEMENTASI KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) TERHADAP MAHASISWA DI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ESA UNGGUL. *Jurnal Abdimas*, 8(2), 117–123.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., ... Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Hernawan, D., Seran, G. G., Purnamasari, I., Multi, A., Apriliani, A., Publik, S. A., ... Komunikasi, S. (2022). Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Evidence-Based Policy Perspective on Implementation of Freedom To Learn Independent Campus Policy. *Jurnal GOVERNANSI*, 8(1), 1–10.
- Jasmarnisa, T. J. (2019). *Pengaruh Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (Permata) Terhadap Wawan Kebangsaan Mahasiswa Di Universitas Negeri Padang*. Retrieved from <http://repository.unp.ac.id/id/eprint/32047>
- Parsons. (1995). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>



- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 7/Per/M.KUKM/VII/2015, N. (2020). Implementasi Program Merdeka b. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(555), 1–53.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi* (Safitri Yosita Ratri, Ed.). Alfabeta.
- Widodo. (2010). *Konsep Implementasi Kebijakan Dalam Kamus Besar Webster*. 12–33.
- Winarno. (2007). “*Hubungan Antara Unit Pemerintah Dengan Lingkungannya*”. 14–47.
- Zainudin, M., & Utami, A. D. (2021). Evaluasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka Berbasis Mata Kuliah menggunakan Provus’s Discrepancy Model dengan Double Smart. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 2(4), 10–21.